



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

**PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA) TAHUN 2016-2021**

**KECAMATAN PATRANG**

**TAHUN 2017**



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakan.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PATRANG</b>	
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Patrang..	7
2.2 Struktur Organisasi Kecamatan Patrang.....	15
2.3 Sumber Daya SKPD Kecamatan Patrang.....	17
2.4 Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Patrang.....	24
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Kecamatan Patrang.....	26
<b>BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Kecamatan Patrang .....	30
3.2 Telahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	31
3.3 Telahan Renstra Kementrian.....	41
3.4 Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	42
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	45
<b>BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	51
4.2 Strategi.....	52
4.3 Kebijakan.....	52
<b>BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF</b>	
<b>BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PATRANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
• Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patrang	



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2016-2021. Renstra ini yang berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan termasuk juga Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Renstra ini disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra Kecamatan Patrang ini berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.050/795/SJ Tanggal 4 Maret 2016 tentang Petunjuk Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017

Perubahan Rencana Strategi Kecamatan Patrang pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Patrang ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para karyawan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, didalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya. Aamiin.

Jember, Desember 2017

  
*[Signature]*  
**Ir. MOH. ROFIQ SUGIARTO**  
PEMBINA  
NIP. 19680413 199303 1 012



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2016-2021. Renstra ini yang berisikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan termasuk juga Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Renstra ini disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renstra Kecamatan Patrang ini berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.050/795/SJ Tanggal 4 Maret 2016 tentang Petunjuk Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017

Perubahan Rencana Strategi Kecamatan Patrang pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Patrang ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para karyawan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, didalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya. Aamiin.

Jember, Desember 2017

  
Kecamatan Patrang  
Kabupaten Jember  
Ir. MCH. ROFIQ SUGIARTO  
PEMBINA  
NIP. 19680413 199303 1 012



## **BAB I**

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang**

Penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyusunan dan penetapannya perubahan Renstra OPD tetap berpedoman pada aturan yang sama dengan penyusunan Renstra OPD dalam kaitannya dengan Perubahan yang dilakukan juga kepada RPJMD yaitu sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyiapkan rancangan Renstra OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah (Pasal 15 Ayat 3), selanjutnya Kecamatan menyusun rancangan Renstra OPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (Pasal 15 ayat 4). Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut bahwa penyusunan dan penetapan Renstra OPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJM Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan OPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.



Selanjutnya Kecamatan Patrang sebagai Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Jember yang lebih Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri. Rencana Strategis Kecamatan Patrang adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Rencana Strategis Kecamatan Patrang tahun 2016-2021, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD tahun 2017
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021;



19. Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jember.

### **1.3. Maksud dan Tujuan.**

Perubahan Renstra Kecamatan Patrang Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Jember periode tahun 2016-2021 yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Patrang selama kurun waktu 2016-2021, Sedangkan Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Patrang tahun 2016-2021 adalah :

1. Menjadi pedoman dan acuan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan Patrang yang berkualitas dan terukur dalam mencapai target Perubahan RENSTRA tahun 2016 - 2021.
2. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Patrang.
3. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Kecamatan Patrang baik tahunan maupun lima tahunan.
4. Memberikan hasil akhir dan pencapaian program-program yang berkualitas dan saling sinergis guna mendukung sasaran pembangunan Kecamatan.
5. Menjadikan program yang terpadu guna mewujudkan koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan dalam mencapai prioritas Kecamatan.
6. Mewujudkan hasil kontrol pelaksanaan program dan kegiatan guna mendukung program dan kegiatan prioritas.



## **1.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Patrang Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PATRANG**

- 2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Patrang
- 2.2 Struktur Organisasi Kecamatan Patrang
- 2.3 Sumber Daya Kecamatan Patrang
- 2.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Patrang
- 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Patrang

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Patrang
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementrian
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KajianLingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN,SASARAN, STRATEGI DANKEBIJAKAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Patrang
- 4.2 Strategi dan Kebijakan

### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

- 5.1 Rencana Program dan Kegiatan

### **BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PATRANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**



## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PATRANG**

Konsepsi Demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menghendaki keberadaan lembaga atau organisasi pemerintahan (birokrasi) yang bekerja secara transparan, partisipatif serta akuntabel. Dimana model kerja birokrasi tersebut merupakan ciri dalam pengelolaan pemerintahan yang baik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Salah satu ciri dari akuntabilitas organisasi Pemerintah adalah peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberian pelayanan yang prima, pelayanan yang adil, cepat dan berkualitas kepada masyarakat. Hal itulah yang menjadi salah satu tujuan diberikannya kebebasan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya melalui kebijakan desentralisasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah aspek perencanaan pembangunan dan aktivitas birokrasi dalam periode tertentu dan berjenjang,

Salah satu teknik penyusunan perencanaan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat yang dapat ditempuh oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa penyusunan rencana kerja strategis OPD disusun berdasarkan pada analisis internal OPD yang dapat meliputi kinerja layanan 5 (lima) tahun sebelumnya berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD, sumberdaya berupa sumber daya manusia dan aset, serta adanya peluang dan tantangan OPD pada periode 5 (lima) tahun kedepan



## 2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Patrang

Secara detail, tugas dan fungsi struktur organisasi Kecamatan Patrang, menurut Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember, adalah sebagai berikut:

### 2.1.1 CAMAT

- a. Camat mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut :
  1. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum.
  2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
  3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
  4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
  5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
  6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan.
  7. Membina dan Pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan.
  8. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah Kecamatan.
  9. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
  10. Melaksanakan Tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Camat dalam melaksanakan tugas mempunyai Fungsi sebagai berikut :



1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi.
2. Penanganan konflik sosial.
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar Propinsi dan Daerah.
4. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan.
5. Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan.
6. Pengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.
7. Pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum Desa berupa peraturan Desa` dan peraturan kepala Desa.
8. Pemberian fasilitasi administasi tata pemerintahan Desa, pengelolaan keuangan Desa, pendayagunaan aset Desa.
9. Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga Kemasyarakatan Desa.
10. Pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.
11. Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
12. Pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga.
13. Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pedayagunaan ruang desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan.



14. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayah kecamatan.
15. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
16. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
17. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi dibidang peningkatan kinerja dan disiplin Pegawai dan
18. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### 2.1.2 SEKRETARIAT

- a. Sekretariat mempunyai Tugas Pokok ;  
Melaksanakan urusan administrasi dan urusan rumah tangga terhadap seluruh unsur yang meliputi perencanaan, kepegawaian, pengadaan maupun urusan rumah tangga dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- b. Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai Fungsi :
  1. Penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaannya;
  2. Penyelenggaraan urusan Administrasi keuangan;
  3. Penyelenggaraan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan
  4. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- c. Sekretariat terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan;Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :
  - 1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok ;  
Melaksanakan administrasi umum, administrasi



kepegawaian, pengadaan maupun urusan rumah tangga dan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris;

1.2 Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi ;

- a. Pelaksanaan usaha umum dan tata usaha Sekretariat tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;
- c. Perbaikan Kantor dan bangunan lain yang dikelola oleh Kecamatan;
- d. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan;
- e. Mengurus kendaraan dan alat-alat lain yang dikelola oleh Kecamatan;
- f. Pelaksanaan persiapan upacara, pertemuan dan rapat dinas serta persiapan penarimaan dan pengaturan tamu;
- g. Penyelenggaraan, pelayanan dan pengelolaan tata usaha kepegawaian serta urusan kepegawaian lainnya;
- h. Penyiapan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- i. Penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan;
- j. Pelaksanaan Tata Usaha barang peralatan dan perbekalan;
- k. Pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan serta pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan;
- l. Penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan; dan



- m. Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas;
- 2.1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas ;
- Merencanakan program perencanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
- 2.2 Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Fungsi ;
- a. Penghimpunan dan pengelolaan bahan untuk menyusun anggaran, baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung;
  - b. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;
  - c. Perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan Pajak;
  - d. Perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
  - e. Penganalisa, pengevaluasi dan pengendalian sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - f. Pengelolaan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;
  - g. Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
  - h. Pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji Pegawai;
  - i. Peengurusan keuangan perjalanan dinas maupun administrasi pengelolaan keuangan Kecamatan;
  - j. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan bidang keuangan;



- k. Menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke kas daerah;
- l. Melakukan pembinaan administrasi keuangan; dan
- m. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;

### 2.1.3 SEKSI PEMERINTAHAN

1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Umum dan Desa/ Kelurahan dan Fasilitasi kegiatan politik dalam Negeri serta tugas lain yang diberikan oleh Camat;
2. Untuk Melaksanakan tugas seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Umum dan Desa / Kelurahan;
  - b. Penyelenggaraan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik Daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan;
  - c. Penyusun program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial, politik, idiologi dan kesatuan bangsa; dan
  - d. Penyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;

### 2.1.4 SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan ketentraman dan keretiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan Tugas lain yang diberikan oleh Camat;
2. Untuk Melaksanakan tugas Seksi Ketentraman dan ketertiban mempunyai fungsi :



- a. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja;
- c. Penyusunan program dan pembinaan SATLINMAS;
- d. Pengkoordinasian bidang keamanan dan ketertiban diwilayah Kecamatan;
- e. Pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
- f. Pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas-tugas penanggulangan bencana diwilayah; dan
- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;

#### **2.1.5 SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :
  - a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
  - b. Mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan keluarga Berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga;
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
2. Untuk melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat;
  - b. Penyusunan program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik diwilayah Kecamatan;
  - c. Penyusunan program dan pembinaan pembedayaan masyarakat;



- d. Penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup;
- e. Pemberian fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga, lembaga keswadayaan masyarakat;
- f. Penyusunan program percepatan pengentasan kemiskinan diwilayah kecamatan;
- g. Penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
- h. Penyusunan program dan pemberian fasilitasi kegiatan kehidupan beragama;
- i. Penyusun program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
- j. Penyusunan program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal kesenian serta kebudayaan diwilayah kecamatan;
- k. Penyusunan program dan pemberia pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
- l. Penyusunan program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga diwilayah kecamatan;
- m. Mengkoordinasikan peleksanaan pemberian bantuan Pemerintah; dan
- n. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas peleksanaan tugas;

#### **2.1.6 SEKSI PELAYANAN UMUM**

1. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat diwilayah kecamatan, pelayanan dasar dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perijinan, kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitasi



kegiatan ekonomi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Camat;

2. Untuk melaksanakan tugas Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :
  - a. Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - b. Pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perijinan diwilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
  - c. Pemberian fasilitasi pelayanan dibidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan;
  - d. Pemberian fasilitasi pelayanan dibidang industri dan usaha kecil; dan
  - e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;

#### **2.1.7 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

1. Kelompok Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam bernilai kelompok sesuai dengan bidang ahlinya;
2. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati;
3. Jenis Jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

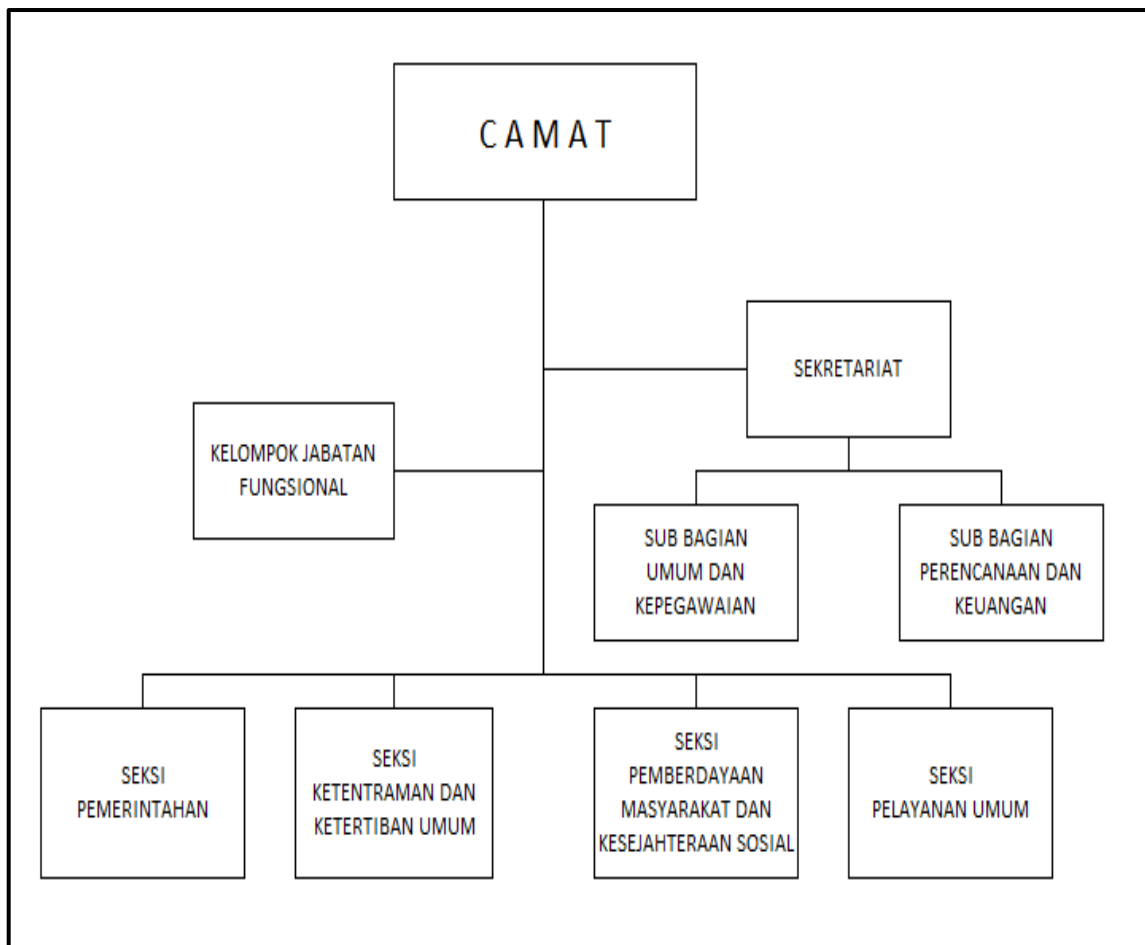
## **2.2. Struktur Organisasi Kecamatan Patrang**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember No. 61 Tahun 2016 tanggal 01 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata kerja Kecamatan di Kabupaten Jember, maka susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagai berikut :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
- f. Seksi Pelayanan Umum; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

Gambar 2.2  
Struktur Organisasi Kecamatan Patrang





## 2.3 SUMBER DAYA KECAMATAN PATRANG

### 2.3.1 Gambaran Umum Wilayah

Kecamatan Patrang terletak ditengah-tengah wilayah Jember dan merupakan satu diantara Kecamatan kota di Kabupaten Jember. Kecamatan Patrang merupakan pemasok hasil-hasil pertanian terdekat kewilayah kota. Hal ini didukung oleh ketersediaan lahan pertanian yang cukup dan tanah yang subur tentunya. Kecamatan Patrang adalah salah satu dari 3 (tiga) Kecamatan yang masuk wilayah Kota Jember yang mempunyai batas-batas :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Arjasa
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Sumbersari
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Kaliwates
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Sukorambi

Luas wilayah Kecamatan Patrang adalah 3.842,18 Ha dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sebanyak 92.589 orang yang terdiri dari 45.329 pria dan 44.749 perempuan

### 2.3.2 Sumberdaya Manusia Kecamatan Patrang

Sumberdaya merupakan potensi yang dimiliki Kecamatan Patrang dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan, salah satunya sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha dalam mencapai target organisasi dan meningkatkan kinerja organisasi.

Kecamatan Patrang dengan 8 (delapan) Kelurahan yang merupakan Perangkat Kecamatan patrang memiliki sumberdaya manusia sebanyak 136 ( Seratus Tiga Puluh Enam ) orang dengan rincian sebagai berikut :

- 79 orang pegawai negeri sipil
- 57 orang tenaga non PNS ( Banpol dan Sukwan )

#### 2.3.2.1 Status

Dari keseluruhan sumberdaya manusia Kecamatan Patrang yang keseluruhan berjumlah 136 orang, dari status kepegawaian sumberdaya manusia tersebut

terbagi pada status PNS dan Non PNS, seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.3.2.1  
Status Kepegawaian Kecamatan Patrang

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	PNS	79
2	Non PNS	57
<b>JUMLAH</b>		<b>136</b>

#### 1.3.1.1 Pangkat Golongan dan Jabatan

Berdasarkan pangkat golongan dan jabatan Aparatur Kecamatan Patrang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.2.2  
Data Aparatur Kecamatan Patrang Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	GOLONGAN IV	1
2	GOLONGAN III	37
3	GOLONGAN II	31
4	GOLONGAN I	10
<b>JUMLAH</b>		<b>79</b>

Dari tabel tingkat golongan tersebut dapat terbaca, bahwa tingkat golongan dari personil Kecamatan Patrang yang terbanyak adalah golongan III, sebanyak 37 orang (42%) dari seluruh staf Kecamatan Patrang ). Meskipun tingkat pendidikan dan golongan cukup secara umum untuk menangani kegiatan perencanaan pembangunan di Kabupaten Jember, masih diperlukan adanya tambahan tenaga pelaksana teknis perencanaan, baik dengan latar belakang teknis maupun fungsional.

#### 1.3.1.2 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan Aparatur Kecamatan Patrang  
Adalah sebagai berikut

Tabel 2.3.2.3  
Data AparaturKecamatan Patrang Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
<b>PNS</b>		
1	PASCA SARJANAS-3	-
2	PASCA SARJANAS-2	1
3	SARJANAS-1	19
4	DIPLOMA III	4
5	DIPLOMA II	-
6	SLTA	41
7	SLTP	6
8	SD	8
<b>JUMLAH</b>		<b>79</b>
<b>NON PNS</b>		
1	SARJANAS-1	7
2	DIPLOMA III	3
2	SLTA	8
3	SLTP	5
4	SD	13
<b>JUMLAH</b>		<b>57</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>136</b>

Berdasarkan tabel tingkat pendidikan diatas,dapat terbaca bahwa tingkat pendidikan dari pegawai Kecamatan Patrang yang terbanyak berpendidikan SLTA.

#### **Sarana dan Prasarana SKPD**

Guna mendukung kelancaran program kegiatan di SKPD Kecamatan Patrang telah tersedia sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi guna tercapainya tujuan pelayanan kepada masyarakat yang antara lain :

1. Bangunan Gedung Kantor yang cukup representatif
2. Rumah Dinas Camat
3. Musholla
4. Kendaraan Dinas Camat dan Pol. PP ( Roda 4 )
5. Kendaraan Dinas Camat ( Roda 2 )
6. Alat – alat Besar



7. Alat Kantor dan Rumah Tangga
8. Alat Studio dan Komunikasi
9. Jalan dan Jembatan
10. Buku Perpustakaan
11. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

• **Pembagian luas wilayah, ketinggian dan jarak tempuh**

NO	KELURAHAN	LUAS ( Ha )	LUAS SAWAH (Ha)	LUAS TEGAL (Ha)	KETING GIAN ( M/DPL )	JARAK KE KECAMATAN ( KM)
1	GEBANG	424	242,00	5,00	104	1,5
2	JEMBER LOR	24.72	97,50	42,30	101	1
3	PATRANG	133.4	132,00	69,30	106	0,5
4	BARATAN	541.50	363,39	195,03	138	0,5
5	BINTORO	890	287,38	394,02	146	1
6	SLAWU	1.265	230,00	64,00	161	2
7	JUMERTO	292.532	94,00	63,26	204	3
8	BANJARSENGON	271	167,00	20,00	287	4
	JUMLAH	3.842.15	1.613,27	852,91	1.247	

• **Pembagian wilayah Dusun, RW, RT**

NO	KELURAHAN	JLH. LINGKUN GAN	JLH. RW	JLH. RT	JLH KK
1	GEBANG	7	30	113	6.687
2	JEMBER LOR	6	25	83	1.461
3	PATRANG	4	20	75	4.601
4	BARATAN	5	11	37	3.600
5	BINTORO	5	15	44	3.703
6	SLAWU	3	12	34	1.638
7	JUMERTO	2	4	15	896
8	BANJARSENGON	4	9	24	1.317
	JUMLAH	36	126	425	23.883



• **Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin**

NO	KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	GEBANG	15.855	13.507	29.362
2	JEMBER LOR	2.267	2.638	5.265
3	PATRANG	9.940	8.930	17.970
4	BARATAN	4.995	5.183	12.329
5	BINTORO	5.699	7.012	12.711
6	SLAWU	3.855	3.777	7.632
7	JUMERTO	1.442	1.460	2.902
8	BANJARSENGON N	2.176	2.242	4.418
	JUMLAH	45.329	44.749	92.589

• **Jumlah Sekolah**

NO	KELURAHAN	TK, PAUD	SD,MI	SLTP/ MTs	SLTA,SMK, ALIYAH
1	GEBANG	21	9	2	4
2	JEMBER LOR	148	425	248	131
3	PATRANG	17	2	1	5
4	BARATAN	0	0	0	0
5	BINTORO	6	5	2	2
6	SLAWU	5	2	4	0
7	JUMERTO	4	2	2	0
8	BANJARSENGON	3	2	2	2
		204	447	261	144

• **Jumlah Pondok pesantren**

NO	KELURAHAN	Jml Ponpes
1	GEBANG	3
2	JEMBER LOR	2
3	PATRANG	4
4	BARATAN	3
5	BINTORO	5
6	SLAWU	2
7	JUMERTO	3
8	BANJARSENGON	1
	JUMLAH	23



• **Jumlah Tempat Ibadah**

No	KELURAHAN	Masjid	Gereja protestan	Gereja Katholik	Pura	Viha ra
1	GEBANG	19	67	-	-	-
2	JEMBER LOR	20	57	5	1	-
3	PATRANG	14	70	-	1	-
4	BARATAN	15	36	-	-	-
5	BINTORO	20	64	-	-	-
6	SLAWU	7	32	-	-	-
7	JUMERTO	9	18	-	-	-
8	BANJARSENGON	5	22	-	-	-
	JUMLAH	109	366	5	2	-

• **Sarana Kesehatan**

NO	KELURAHAN	PUS KES MAS	DOK TER PRAKTEK	PUSKES MAS PBTU	POLI DES	POS YANDU	POS KES DES
1	GEBANG	1	-	-	-	26	-
2	JEMBER LOR	-	-	1	-	27	-
3	PATRANG	-	4	1	-	23	-
4	BARATAN	-	-	-	1	4	1
5	BINTORO	-	-	-	1	15	1
6	SLAWU	-	-	1	-	6	-
7	JUMERTO	-	-	-	1	4	1
8	BANJARSENGON	1	-	1	-	5	-
		2	4	4	3	110	3

• **Tenaga kesehatan**

NO	KELURAHAN	DOKTER	BIDAN	MANTRI KESEHATAN	DUKUN BAYI
1	GEBANG	5	7		3
2	JEMBER LOR	18	8		-
3	PATRANG	29	3		2
4	BARATAN	-	2		2
5	BINTORO	1	4		5
6	SLAWU	-	2		2
7	JUMERTO	-	2		1
8	BANJARSENGON	-	2		2
		48	27		17



• **Kelengkapannya ( Sarana dan Prasarana Kantor )**

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional Kecamatan Patrang dibutuhkan adanya peralatan/ perlengkapan kerja atau aset. Adapun aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Camat selaku Pengguna Barang. Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan, maka peralatan/perlengkapan yang mendukung kerja pegawai sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung kantor	1 unit	
2.	Rumah dinas Camat	1 unit	
3.	Pendopo	1 unit	
4.	Tempat Sholat/ Musholla	1 unit	
5.	Kendaraan roda 4 (empat)	2 buah	
6.	Kendaraan roda 2 (dua)	2 buah	
7.	Generator Set	2 buah	
8.	Almari Arsip	13 buah	
9.	Filling Kabinet	2 buah	
10	Brankas	1 buah	
11	Papan Bagan Organisasi	1 buah	
12	Mesin Penghancur Kertas	1 buah	
13	Pigura	12 buah	
14	Meja Kursi Tamu	2 set	
15	Meja Kerja	4 set	
16	Meja Rapat	3 buah	
17	Meja Partisi Kantor	1 buah	
18	Kursi Kerja	4 buah	
19	Kursi Rapat	2 buah	
20	Meja dan Kursi Tamu	1 set	
21	Mesin Potong Rumput	2 buah	
22	A C	5 buah	
23	Televisi	3 buah	
24	Sound System	2 set	



25	Microfon	2 set	
26	U P S	2 buah	
27	Kamera	1 unit	
28	Komputer PC	7 unit	
29	Laptop	2 buah	
30	Printer	7 buah	
31	Proyektor	1 unit	
32	Pengeras Suara	2 buah	
33	Faximile	2 buah	
34	Tabung Pemadam	1 buah	
35	Kipas Angin	1 buah	
36	Dispenser	2 buah	
37	Lambang Garuda Pancasila	1 buah	
38	Gambar Presiden dan Wakil Presiden	1 buah	
39	Pompa Air	1 buah	
40	Lemari Es	1 buah	
41	Exhaous Fan	1 buah	
42	Kursi Tunggu Tamu	3 set	
43	Papan Data	20 buah	
44	Mesin Jahit	1 buah	
45	Mesin Obras	1 buah	

## 2.4 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PATRANG

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepan sebagaimana telah dijelaskan pada BabII, maka Kecamatan Patrang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan Pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana pemerintahan umum dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan, dituntut untuk menghasilkan produk-produk



yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah, baik Dokumen Perencanaan jangka Pendek, Jangka Menengah, maupun Jangka Panjang.

Pengukuran tingkat kinerja Kecamatan Patrang yang tertuang dalam Renstra tahun 2010 - 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kerjanya, namun demikian terdapat pula beberapa sasaran strategis yang belum sepenuhnya berhasil diwujudkan pada tahun 2010 s/d tahun 2015. Dalam upaya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi, Kecamatan Patrang telah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Kinerja Kantor Kecamatan Patrang tercermin dalam pencapaian sasaran -sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatnya disiplin Aparatur Kecamatan
4. Terwujudnya kelancaran sarana transportasi yang memadai
5. Meningkatnya pelayanan administrasi Kependudukan kecamatan
6. Meningkatnya ketrampilan kader PKK yang terampil dan terlatih
7. Terpenuhinya masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan Terbinanya Club-club olah raga
8. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan lingkungan yang sehat
9. Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan yang berazaskan *Bottom Up Planning*.

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100 %. Dalam usaha mencapai sasaran Kantor Kecamatan Patrang menetapkan kebijakan



yang dijabarkan dalam 10 ( Sepuluh ) program.Pencapaian target kinerja seperti tampak dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.4**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD**  
**KECAMATAN PATRANG TAHUN 2011-2015**

No.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA TAHUN					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional kantor	98%	98,81%	97,50%	96,50%	93,46%	94,02%
2.	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	99,10%	97,99%	98,25%	99,40%	98%	96,55%
3.	Persentase tingkat disiplin Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	97,75%
4.	Jumlah Panjang jalan/ lokasi jalan yang dibangun	6	6	6	6	6	-
5.	Persentase Masyarakat yang dibina dalam menjaga ketertiban dan keamanan / masyarakat berdaya	100%	100%	100%	100%	99,25%	99,57%
6.	Jumlah Pertemuan kegiatan pemberdayaan perempuan	12	12	12	12	12	12
7.	Persentase tingkat pemenuhan dokumen administrasi kependudukan yang dilayani dikecamatan	-	-	99,80%	100%	99,97%	99,99%
8.	Persentase tingkat kesadaran masyarakat menjaga lingkungan yang bersih dan sehat	-	-	100%	100%	-	100%
9.	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan kecamatan	-	-	-	100%	100%	100%

## 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Patrang

2.5.1. Tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Patrang sebagai berikut :

- a. Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.



- b. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
- c. Aksesibilitas pusat pemerintahan Kecamatan dengan Desa yang masih rendah.
- d. Terbatasnya kewenangan pelayanan Kantor Kecamatan Patrang sehingga pelayanan satu pintu (*One Step Service*) belum terwujud.
- e. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Desa dan kecamatan.
- f. Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan.
- g. Belum terlaksananya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.
- h. Penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- i. Pelayanan prima Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Jember yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar – benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan
- j. atau aturan yang berlaku seiring dengan program pemerintah mengenai pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).

2.5.2. Peluang Yang dihadapi oleh Kecamatan Patrang sebagai berikut :

1. Beragam masalah yang dihadapi sekarang ini dalam bidang pembangunan dari berbagai sektor, sehingga memerlukan prioritas program dan kegiatan, yang telah dimusyawarahkan dalam musrenbang tingkat Kecamatan, tetapi dari hasil



musrenbang tersebut masih banyak yang belum masuk dalam prioritas program dan kegiatan dinas instansi terkait di tingkat Kabupaten. Harapan dari kami dinas instansi tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan program dan kegiatan juga mengacu pada hasil musrenbang tingkat Kecamatan.

2. Belum tercapainya target PBB di Kecamatan Patrang dikarenakan penyampaian SPPT kepada wajib pajak yang terlambat, SPPT belum sesuai dengan nama dan alamat wajib pajak, sehingga diadakan pembetulan yang kadang juga masih keliru. Sehingga dari Perangkat Desa menyampaikan kepada wajib pajak terlambat, warga yang berdomisili di luar daerah sering terlambat membayar dan kurang kedisiplinan para pemungut untuk menarik wajib pajak dan uang penarikan sebagian digunakan oleh pemungut itu sendiri. Diharapkan untuk yang akan datang dan selanjutnya dari Dinas Pendapatan Daerah memberikan SPPT kepada wajib pajak lebih awal dan menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam penyetoran pajak.
3. Kurangnya koordinasi antara Lurah dan Perangkat Kelurahan. Perangkat Kelurahan belum difungsikan sesuai tupoksinya, sehingga masih banyaknya kegiatan yang terlambat. Kecamatan sebagai tim fasilitasi telah bekerja secara maksimal dengan sistem jemput bola, membina dan memfasilitasi. Pentingnya koordinasi antara Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan di Desa.
4. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan "PATEN" merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas



pelayanan terpadu di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATEN, diharapkan pelaksanaan PATEN sudah berjalan dengan lancar.



## **BAB III** **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kekhlayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Patrang**

Bertitik tolak dari pengertian isu-isu strategis di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Patrang, maka Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayananyang berkembang terhadap Kecamatan Patrang yang berhasil diobservasi dan dihimpun fenomenanya dari komentar aparatur Kelurahan serta stakeholders sebagai berikut:

- a. Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
- b. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
- c. Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
- d. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
- e. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kecamatan.
- f. Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan.



### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember, yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Jember 2016–2021. Proses telaah ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Patrang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Jember tahun 2016-2021, adalah :

***"Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur,  
Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri"***

dengan penjelasan sebagai berikut:

#### **Jember Bersatu**

Adalah wujud dari adanya rasa kebersamaan, sinergi dan gotong royong dari masyarakat, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat dan Organisasi Massa, Politik, Perusahaan Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pers, Perguruan Tinggi, Tokoh-Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta segenap unsur masyarakat lainnya untuk bersama-sama dalam perannya masing-masing, berupaya terbaik untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Masing-masing komponen masyarakat tersebut menyadari perannya yang sangat penting untuk kemajuan daerah. Sehingga proaktif menyediakan diri untuk berperan serta dalam mengatasi permasalahan-



permasalahan di masyarakat.

Sangat disadari, rasa kebersamaan dan gotong royong dalam masyarakat semakin memudar. Oleh sebab itu, peran pemerintah kembali melakukan upaya agar masyarakat tergugah untuk kembali mau bergerak dan memberikan sumbangsih dalam pembangunan. Tanpa adanya kebersamaan, gotong royong dan sinergi, mustahil kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Sebab, kemampuan pemerintah ditinjau dari sisi ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran sangat terbatas untuk mengakomodasi seluruh kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Jember Bersatu adalah sebuah proses sekaligus target yang merupakan gerakan pemerintah daerah untuk mensinergikan seluruh potensi masyarakat di wilayah Kabupaten Jember, potensi dalam jaringan level nasional, bahkan internasional untuk mencapai tujuan pembangunan. Sinergi itu diarahkan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

### **Jember Lebih Makmur dan Sejahtera**

Adalah terwujudnya peningkatan kemakmuran yang ditandai dengan peningkatan pendapatan masyarakat, bergairahnya kehidupan perekonomian, peningkatan produktifitas tenaga kerja, serta terjaganya harga-harga barang dalam jangkauan daya beli masyarakat. Sebagai buah dari kemakmuran ini adalah kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata kehidupan yang aman dan tenteram, rukun dan damai.

Di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, juga bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu



diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis, maupun intelektualitas. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteram, damai, sentosa, dan makmur.

### **Jember Berkeadilan**

Adalah terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi semua orang, bukan kesejahteraan orang seorang maupun sekelompok orang. Kesejahteraan yang berkeadilan adalah bersifat distributif, yakni adanya kesetaraan kondisi awal yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya dan proporsionalitas hasil yang diperolehnya dari setiap upaya yang dilakukan. Proses pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang berjalan dalam proses perubahan struktur yang benar, diarahkan agar rakyat yang menikmati pembangunan haruslah mereka yang menghasilkan dan mereka yang menghasilkan haruslah yang menikmati secara berkeadilan.

Upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan merefleksikan sikap dan komitmen keberpihakan kepada elemen masyarakat yang lemah atau termarginalisasi, agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah, karena kekurangberdayaan menghadapi yang kuat. Keberpihakan ini merupakan upaya mencegah terjadinya persaingan tak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

### **Jember Mandiri**

Adalah terwujudnya kemampuan atau keberdayaan yang dapat membangun, dan memelihara kelangsungan hidup berlandaskan kekuatan sendiri. Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan bersamaan dengan peningkatan kemandirian. Membangun kemandirian sosial merupakan upaya mengembangkan kemampuan "berdikari" (Berdiri di Atas Kaki Sendiri), dan secara proaktif melepas belenggu ketergantungan dan hambatan struktural yang memasung potensinya,



baik secara ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya, sehingga mampu berdaulat dan bebas dalam politik; Berkedaulatan hukum; Berdikari dalam ekonomi; dan Berkepribadian dalam kebudayaan; yang berlangsung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemandirian juga mengandung aspek kemampuan daya saing Jember, bukan saja karena keunggulan komparatif (*comparative advantage*), tetapi terutama keunggulan kompetitif (*competitive advantage*), menyangkut peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, pemasaran, dan akses permodalan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya menghadapi ASEAN *Economic Community* yang dimulai akhir tahun ini.

Kemandirian juga terkait dengan upaya meningkatkan daya saing budaya lokal menghadapi ASEAN *Socio Cultural Community* pada tahun 2015, agar tidak tergesur dan lenyap ditelan oleh integrasi sosio kultural ASEAN, maupun budaya asing lainnya. Puncak-puncak kebudayaan wilayah yang merupakan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional harus terus dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan agar karakter dan jati diri bangsa menjadi unggulan sebagai daya saing, dan karenanya tetap mampu berkepribadian dalam kebudayaan. Budaya dan tradisi lokal yang merupakan kearifan lokal (*local wisdom*) harus pula dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan sebagai basis pembangunan, yang pada gilirannya dapat memperkuat pembangunan karakter bangsa secara keseluruhan. Kearifan lokal merupakan pengetahuan setempat (*local knowledge*), atau kecerdasan lokal (*local genius*), yang menjadi dasar identitas budaya (*cultural identity*).

Kemandirian masyarakat juga diarahkan pada terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, dalam konteks rohaniah maupun spiritual, karena kesejahteraan tanpa akhlak dan moral akan membawa kita ke dalam jurang kehancuran. Akhlak



merupakan budi pekerti, perangai, tabiat, atau moralitas luhur yang terutama bersumber dari kesalehan individual sesuai ajaran agama yang diyakini, yang pada gilirannya akan melahirkan kesalehan sosial, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati sosial, toleransi sosial, solidaitas sosial, dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang akan bermuara pada terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Visi terwujudnya "Jember Bersatu Menuju Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri", berlangsung dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karenanya pembangunan Jember juga ditujukan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan serta kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan. Jember untuk Indonesia.

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi OPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jember Tahun 2016-2021 yaitu "Jember Bersatu Menuju Terwujudnya Masyarakat Makmur,



Sejahtera, Berkeadilan, dan Mandiri", tersebut, ditempuh melalui 3 misi yang diberi Judul "Jember Baru, Jember Bersatu". Tiga misi ini merupakan gambaran berbagai usaha untuk menjamin tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Jember.

Sebagaimana kita sadari bersama, selama 10 tahun terakhir ini, dengan tetap menghormati hasil-hasil pembangunan yang ada, kondisi masyarakat Jember masih belum sepenuhnya dapat disentuh pembangunan. Rasa kegotongroyongan di kalangan masyarakat sangat rendah. Potensi besar di kalangan masyarakat, pada akhirnya tidak dapat dioptimalkan untuk kebutuhan pembangunan. Semuanya berjalan sendiri tanpa koordinasi optimal. Inilah esensi pembangunan selama lima tahun ke depan yang menjadi fokus, yaitu mengupayakan agar peran serta masyarakat secara nyata dapat dikonsolidasikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Masalah-masalah pembangunan yang mengemuka, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, masalah kesehatan, pendidikan dan rendahnya indeks pembangunan manusia akan semakin cepat dan mudah diatasi dengan kebersamaan dan sinergi.

Orientasi kerakyatan dalam Jember Bersatu menempati porsi yang penting. Sebab kewenangan yang diperoleh pemerintah daerah melalui proses Pemilihan Kepala daerah haruslah dipertanggungjawabkan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat, khususnya kaum dhuafa (miskin) yang selama ini kehidupannya terabaikan. Kaum dhuafa ini adalah mereka yang mengalami ketidakberdayaan (*powerless*) akibat termarginalisasi (*marginalized*), keterampasan (*deprivation*), serta pembungkaman (*silencing*) dalam proses pembangunan. Secara sosial ekonomi mereka adalah berstatus kesejahteraan 40% terendah, sebagaimana kriteria pengelompokan yang digunakan dalam Basis Data Terpadu, Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011. Jumlah kaum dhuafa ini mencapai ± 250.000 Kepala Keluarga.



Tiga misi "Jember Baru, Jember Bersatu" untuk mewujudkan Visi Jember "Jember Bersatu Menuju Terwujudnya Masyarakat Makmur, Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri", adalah sebagai berikut :

***Misi Pertama: Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.***

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta profesionalitas pelayanan publik. Reformasi Birokrasi adalah prasyarat (pre-requisite), untuk tercapainya dan terwujudnya proses sinergi pembangunan yang mampu mengkonsolidasikan segenap potensi masyarakat. Budaya paternalistik yang berkembang di masyarakat, menuntut pola kepemimpinan yang bersih, mengayomi dan aspiratif. Kekuatan kepemimpinan inilah yang akan mengakomodasi proses perubahan dan reformasi birokrasi secara optimal.

Pelayanan Publik yang profesional juga penting sebagai langkah lanjutan dari keberhasilan reformasi birokrasi. Tuntutan masyarakat modern terhadap pelayanan publik yang responsif saat ini tidak dapat lagi ditawar, apalagi di tengah-tengah dinamika pembangunan ekonomi yang sangat luar biasa serta persaingan yang ketat antardaerah ataupun antarnegara. Pendekatan 'Old Public Administration' dimana masyarakat dianggap sebagai klien yang diarahkan kebutuhan pelayanannya harus bergeser ke pendekatan 'New Public Management' dimana masyarakatlah yang menentukan kebutuhan pelayanannya sebagai pengguna layanan. Pemerintah berkewajiban memberikan alternatif pelayanan yang rasional dan berkualitas. Oleh karena itu standarisasi pelayanan perlu diterapkan kesuluruh organisasi pelayanan pemerintah. Bahkan pelayanan juga bergerak ke arah pendekatan 'New Public Service' dimana masyarakat yang termarginalkan terutama kaum dhuafa mendapatkan prioritas pelayanan sehingga aksesibilitas pelayanan terjangkau oleh mereka.



Hal penting dalam mewujudkan misi reformasi birokrasi dan pelayanan publik ini adalah upaya untuk memperkuat kelembagaan pemerintahan desa dan kecamatan. Pemerintahan desa dan kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat. Kualitas pemerintahan desa dan kecamatan akan secara langsung berimplikasi pada kualitas pelayanan pada masyarakat. Indikator Kinerja: IKM, Opini BPK, Nilai LAKIP/LPPD, Angka Pelanggaran ASN

***Misi Kedua : Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Berkeadilan.***

Misi ini untuk mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebutuhan dasar itu meliputi kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial serta keamanan dan ketertiban di masyarakat. Rancangan pembangunan perlu diarahkan untuk mengembangkan akses terhadap pemenuhan dasar tersebut secara merata dan berkeadilan. Hal ini juga merupakan upaya untuk percepatan program penanggulangan kemiskinan.

Peningkatan kesalehan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama, termasuk di dalamnya kerukunan antar-umat beragama, sehingga dapat tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sekaligus merevitalisasi budaya dan tradisi yang merupakan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa dan harmoni sosial, dengan dukungan keamanan dan ketertiban yang semakin meningkat, serta penegakan supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Indikator Kinerja: IPM, Index Gini Ratio, Angka kemiskinan, Angka Pengangguran, Angka Harapan Hidup, Laju Pertumbuhan Penduduk.

***Misi Ketiga : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Mandiri dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis***



### ***/Agro-industri dan Industrialisasi Secara Berkelanjutan.***

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan (inklusif), sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing, terutama berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi. Pembangunan ekonomi ini juga harus berkelanjutan dalam arti memperhatikan dan menimbang aspek eksistensi lingkungan hidup dan keseimbangan. Pembangunan ekonomi dan pembangunan secara luas juga harus mengacu pada tata ruang. Dalam hal ini perlu diwujudkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah sampai pada perencanaan detailnya di level kecamatan.

Peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, serta percepatan kinerja sektor agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi, peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal, dan peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri, luar negeri, dan investasi daerah. Serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Seluruh aktifitas ekonomi diatas harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Sehingga sumber daya alam dan lingkungan yang dimiliki dapat terjaga pemanfaatannya dan terhindar dari kerusakan lingkungan. Hak-hak warga negara dimasa yang akan datang tidak akan dikorbankan oleh kebijakan ekonomi yang merusak lingkungan.

Indikator Kinerja: Angka Pertumbuhan Ekonomi, Angka Inflasi, Angka PAD, PDRB, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember tersebut di atas dijabarkan ke dalam 22 janji kerja, yaitu :

1. Sekolah gratis hingga tingkat SMA/SMK



2. Memberikan 5000 beasiswa Perguruan Tinggi bagi siswa berprestasi
3. Meningkatkan mutu pendidikan Diniyah/Madrasah dan Pondok Pesantren serta memperkuat jaringan Masjid dan Pondok Pesantren sebagai pusat informasi dan pendidikan public
4. Meningkatkan sebesar 3 kali lipat honor guru mengaji dan meningkatkan bantuan untuk guru PAUD
5. Menjadikan Jember sebagai pusat embarkasi Haji wilayah Timur Indonesia
6. Memberikan asuransi kesehatan bagi para khatib dan guru mengaji
7. Meningkatkan kualitas infrastruktur dengan melakukan pengaspalan jalan hingga ke pelosok, membangun dan memperbaiki jembatan, drainase dan irigasi
8. Mengembangkan warung berjaringan, merevitalisasi pasar tradisional dan menata Pedagang kaki lima untuk meningkatkan pendapatan para pedagang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka
9. Memberikan bantuan modal usaha, teknologi dan pemasaran untuk petani, peternak, nelayan, UMKM dan Koperasi
10. Membangun kedaulatan pangan melalui penyediaan pengairan, penyediaan pupuk tepat waktu, dan optimalisasi lahan pertanian
11. Menata dan merevitalisasi industri tembakau dengan meningkatkan produktivitas sektor ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh tembakau
12. Meningkatkan potensi sumberdaya kelautan dan meningkatkan perlindungan bagi masyarakat pesisir antara lain dengan memberikan asuransi kerja untuk para nelayan
13. Memberikan layanan kesehatan gratis untuk semua dan melakukan operasi gratis bagi Dhuafa
14. Membangun dan merevitalisasi berbagai fasilitas dan pusat layanan kesehatan yang mendekat ke masyarakat, antara lain : merevitalisasi Puskesmas, Menyediakan 3 dokter di setiap puskesmas dan ambulans di setiap desa



15. Membangun layanan usaha dan layanan public satu pintu yang transparan dan efisien untuk mendorong laju perekonomian dan investasi daerah dan memperluas lapangan kerja
16. Mereformasi birokrasi untuk mempermudah dan mempercepat layanan-layanan bagi warga, membangun sistem anti korupsi, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai honorer dan PNS
17. Memperkuat kelembagaan desa dalam rangka meningkatkan keterlibatan dan kesejahteraan masyarakat desa, antara lain melalui program satu desa satu dosen, mencairkan dana desa secara tepat waktu dan menyegerakan pelaksanaan UU Desa dengan menerbitkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
18. Meningkatkan bantuan/honor Ketua RT dan RW
19. Mengembangkan industri kreatif dan pariwisata untuk menjadikan Jember sebagai salah satu kota wisata utama
20. Merintis dan mengembangkan bandara Jember menjadi bandara komersial
21. Mengembangkan kegiatan olahraga, kesenian, kebudayaan, kepemudaan berbasis taman-taman publik
22. Menjadikan Jember sebagai Bumi Shalawat yang ramah lingkungan, ramah warga berkebutuhan khusus, ramah ibu dan anak serta ramah Kelompok Minoritas.

### 3.3 Telaahan Renstra Kementrian

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 bahwa visi Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019 adalah “Terwujudnya suasana yang kondusif dan stabil bagi jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri melalui pembinaan dan pengawasan secara optimal dan efektif, pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan yang optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan, penegakkan demokrasi dan peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat, meningkatkan pemahaman



terhadap wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan, dan rasa cinta tanah air, dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah good government, clean government melalui peningkatan kapasitas aparatur perancang kebijakan daerah.”

Sedangkan misi Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019 yaitu menetapkan kebijaksanaan Nasional dan memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokrasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan umum melalui amonisasi hubungan pusat – daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tanda kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka emantapan pelayanan publik.
6. Mendorong terwujudnya tertib dan kepastian hukum penyelenggaran pemerintahan daerah.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### a. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW )

Peraturan perundang-undangan Tata Ruang Wilayah merupakan



induk dari semua peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek pembangunan. Dalam rangka penataan ruang di Kabupaten Jember telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015 – 2035. Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah.

Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas rencana sistim pusat kegiatan dan rencana sistim jaringan prasarana wilayah. Berdasarkan rencana sistim pusat kegiatan suatu wilayah Kecamatan Patrang termasuk kedalam Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang memiliki fungsi utama pengembangan kawasan meliputi pusat pemerintahan, pusat kesehatan, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan jasa.

Sedangkan rencana sistim jaringan prasarana wilayah terdiri atas sistim jaringan utama yang meliputi sistim jaringan transportasi darat, sistim jaringan transportasi laut, sistim jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta sistim jaringan prasarana lainnya yang meliputi sistim jaringan prasarana energy, sistim jaringan prasarana telekomunikasi, sistim jaringan prasarana sumber daya air dan sistim jaringan prasarana lingkungan.

Sedangkan Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas Kawasan Peruntukan untuk fungsi kawasan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana pola ruang pada dasarnya merupakan zonasi terhadap pemanfaatan suatu wilayah. Kawasan peruntukan untuk fungsi kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan



bencana alam dan kawasan lindung geologi. Sedangkan peruntukan untuk Budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya meliputi pertahanan dan keamanan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pemerintahan dan kawasan sektor informal

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

**b. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Lain halnya dengan amdal yang pada hakekatnya merupakan analisis dampak terhadap lingkungan sebagai akibat pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan KLHS merupakan analisis terhadap kebijakan, rencana dan program pembangunan yang dimungkinkan bisa menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas kajian kebijakan rencana dan program pembangunan serta lebih mengedepankan aspek deliberative artinya setiap langkah melibatkan pihak terkait.



KLHS bersifat tematik artinya bahwa setiap kebijakan, rencana dan program pembangunan wajib memiliki kajian lingkungan hidup strategis. Beberapa kajian rencana pembangunan yang wajib memiliki KLHS diantaranya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya berupa RDTR, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta kebijakan rencana dan/atau program pembangunan nasional dan daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

### **c. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Patrang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Patrang dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Kecamatan Patrang diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Kecamatan Patrang di masa lima tahun mendatang.

#### **1. Kondisi Internal**

- Tersedianya SDM aparatur Kecamatan dan Kelurahan relatif kecil bila dibandingkan dengan kinerja yang diharapkan.



- Struktur Organisasi yang terpola berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor . 61 Tahun 2016, Tanggal 1 Desember 2016.
- Peningkatan fungsi koordinasi di wilayah Kecamatan Patrang yang baik
- Kecukupan Sarana dan prasarana yang tersedia guna mendukung kegiatan di Kantor Kecamatan Patrang
- Ketersediaan dana dalam mendukung kegiatan di Kantor Kecamatan Patrang
- Sistem Kerja yang belum optimal.
- Administrasi yang belum tertib

## **2. *Kondisi Eksternal***

- Banyak kegiatan di semua bidang di Kelurahan yang seharusnya di monitor akan tetapi jumlah karyawan sangat terbatas di semua Seksi di Kecamatan Patrang, sehingga perlu adanya penambahan karyawan
- Sebagian besar Perangkat Kelurahan kurang berfungsi secara optimal perannya dalam pelaksanaan Pemerintahan di Kelurahan
- Kurangnya kesejahteraan perangkat Desa sehingga berpengaruh pada motivasi kerja.
- Instansi sektoral yang terkait kurang proaktif/ kurang koordinasi sehingga apabila ada kegiatan yang berhubungan dengan data tidak sesuai dengan data yang ada dikecamatan.
- Sarana dan prasarana dasar masih terbatas, terutama pada lokasi-lokasi dipelosok kecamatan Patrang.
- Sebagian besar masyarakat menginginkan pelayanan yang dikecamatan bisa selesai cepat waktu namun kecamatan



masih terkendala dengan lamanya proses dari Kabupaten (Dispenduk ).

- Kondisi sosial ekonomi masyarakat Patrang rata-rata telah berada diatas garis kemiskinan.

Prediksi keadaan Kecamatan Patrang 5 (lima) tahun kedepan secara manajerial menurut Teori Analisis SWOT terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### 1. *Faktor Internal*

##### a. Kekuatan (*Strengths*) :

- Tersedianya SDM yang memadai
- Adanya struktur organisasi yang terpola
- Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat
- Adanya koordinasi di Wilayah Kecamatan Patrang yang baik
- Adanya ketersediaan dana dalam mendukung kegiatan dikecamatan Patrang.

##### b. Kelemahan (*Weakness*) :

- Masih rendahnya pemahaman tupoksi di tingkat Kelurahan
- Masih adanya beberapa pelayanan masyarakat yang belum dapat ditangani secara prima karena keterbatasan sarana dan prasarana



- Masih perlu adanya peningkatan koordinasi di tingkat Kecamatan dengan semakin banyaknya program dan kegiatan dari tingkat atas

## 2. *Faktor Eksternal*

### a. Peluang (*Opportunities*) :

- Peningkatan pengetahuan aparatur melalui diklat / pelatihan
- Adanya pembinaan dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi bagi Perangkat Kecamatan dan Kelurahan
- Perlu adanya sosialisasi alih teknologi tepat guna bagi generasi muda sebagai bekal untuk pengembangan SDM dan pengelolaan SDA yang ada lewat Dinas Instansi terkait sehingga mampu mendukung program-program yang direncanakan

### b. Ancaman (*Threats*)

- Masih rendahnya SDM Perangkat Desa
- Kurang Optimalnya pengembangan usaha/hasil pertanian, Perdagangan serta kerajinan di wilayah Kecamatan Patrang.
- Kurang optimalnya hasil kegiatan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan.

Dari faktor internal dan faktor eksternal kemudian diinterasikan dengan mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif yaitu sebagai berikut:

#### 1. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

- a. Koordinasi internal yang baik digunakan untuk meningkatkan tugas koordinasi di wilayah Kecamatan Patrang.



- b. SDM yang memadai dan struktur yang terpola disertai pelimpahan kewenangan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan.
  - c. Pembinaan dan Sosialisasi tentang Perda dan menjamin kepastian hukum.
  - d. Koordinasi internal dan eksternal dalam pengembangan sektor Pertanian/Perdagangan/kerajinan.
  - e. e.Pemanfaatan teknologi tepat guna pendukung Program/hasil pertanian.
2. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang :
- a. Meningkatkan pemahaman tupoksi melalui diklat / pelatihan – pelatihan.
  - b. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana.
  - c. Meningkatkan kordinasi tingkat Kecamatan
3. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman
- a. Meningkatkan fungsi koordinasi dan fasilitasi Pemerintah Kelurahan
  - b. Bekerja sama dengan Dinas Instansi terkait dalam Penegakan Perda dan Kamtibmas
  - c. Meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan
  - d. Pemda bekerja sama dengan pihak ke tiga untuk lebih bisa mengembangkan sektor Perdagangan dan pertanian.



4. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan hindari ancaman
  - a. Meningkatkan kualitas SDM secara menyeluruh
  - b. Mengoptimalkan fungsi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Desa/Desa
  - c. Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta dana dalam pelaksanaan tugas.
  - d. Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi yang lebih atas



## **BAB IV**

# **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

### 4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah penjabaran/implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Kecamatan Patrang menetapkan tujuan sebagai penjabaran Misi yang akan dicapai sebagai berikut :

- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good govermant*), dan bersih (*clean governance*) serta profesionalitas pelayanan publik dalam rangka mewujudkan “JEMBER KUAT DAN BERSIH.”

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

- Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pemerintahan kecamatan dan Kelurahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

Dengan Indikator sarannya adalah Prosentase SKPD yang menjalankan pelayanan publik bernilai B Survey Indek Kepuasan Masyarakat.

Selaras dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, Kecamatan Patrang merupakan OPD yang berperan dalam penuntasan Misi I yaitu “Melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik” dengan Tujuan “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan bersih (*clean government*), serta profesionalitas pelayanan publik” dan Sasaran yaitu :



1. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam upaya peningkatan pelayanan publik.
2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan serta penguatan kelembagaan desa

## 4.2. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Patrang. Strategi yang digunakan oleh Kecamatan Patrang adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada Masyarakat;
- c. Peningkatan profesionalisme dan produktifitas aparatur;
- d. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan;
- e. Penataan ruang pelayanan yang nyaman;
- f. Peningkatan Komitmen dan Motivasi Aparatur;
- g. Pengembangan karier pegawai.
- h. Perbaikan kualitas pendapatan pegawai;
- i. Mengkoordinasikan dana stimulan/ perangsang untuk UKM dan UMKM.
- j. Pengalokasian dana untuk organisasi kemasyarakatan.
- k. Meningkatkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/ kinerja pelayanan publik.

## 4.3 Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Kebijakan yang digunakan oleh Kecamatan Patrang adalah :

- a. Membuat Standart Operating prosedur pelayanan kepada masyarakat lebih transparan dan akuntable.
- b. Mensosialisasikan prosedur pelayanan kepada masyarakat;



- c. Memberikan motivasi kepada aparatur Kecamatan.
- d. Memprioritaskan anggaran untuk perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan;
- e. Melakukan penataan ruang pelayanan;
- f. Mengusulkan aparatur Kecamatan untuk mengikuti diklat-diklat teknis maupun struktural;
- g. Memberikan reward dan punishment/hukuman kepada pegawai dalam rangka mewujudkan disiplin;
- h. Mengkoordinasikan dana stimulan untuk pembangunan.
- i. Mengalokasikan dana untuk organisasi kemasyarakatan.
- j. Peningkatan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja pelayanan publik

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Kecamatan Patrang menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program sebagaimana terlampir pada Tabel 4.1.



## **BAB V**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN**

Seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah oleh karena itu maka secara operasional disusunlah rencana program dan kegiatan indikatif sebagaimana terlampir dalam Tabel 5.1



## **BAB VI**

# **INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PATRANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu Instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran, indikator kinerja yang akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai yang direncanakan.

Selanjutnya Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja Organisasi apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan mengolah data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan Indikator kinerja Kecamatan Patrang untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi, Misi, secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Pelayanan Publik, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemberdayaan Masyarakat.

Kecamatan Patrang untuk 5 (lima) tahun kedepan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (*Outcome*) hasil yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (*Output*) keluaran.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja kecamatan Patrang, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan kedepan baik pengaruh



Ekternal maupun Internal, oleh karena itu indikator kinerja merupakan nsyarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung jawaban saja tetapi juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja,

Dengan Indikator kinerja perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.

Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Patrang yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun kedepan dalam kurun waktu 2016-2021 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai rancangan awal RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Untuk megukur keberhasilan indokator kinerja Kecamatan Patrang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 6.1  
Indikator Kinerja Kecamatan Patrang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jember 2016-2021

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN 2016-2021						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
1.	Persentase Pemenuhan sarana prasarana aparatur yang profesional	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Nilai SKM	-	-	80	80	80	80	80	80
3.	Perseentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan, ketertiban, dan keamanan	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

## INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN PATRANG

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Seksi Pelayanan Umum	Dokumen SKM
2.	Meningkatnya koordinasi pemerintahan, pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Patrang	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketertiban dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kessos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketertiban dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kessos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun  $\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketertiban dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kessos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun}}{\text{Jumlah semua rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketertiban dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kessos yang ditindaklanjuti dalam satu tahun}} \times 100\%$	Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kessos, seksi Ketertiban dan Keamanan	Laporan Hasil koordinasi dari semua seksi

**TABEL 4.1**  
**MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**  
**KECAMATAN PATRANG**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	Strategi	Kebijakan	Program
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan Patrang dalam Pelayanan Publik	Prosentase Tingkat Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1. Menciptakan Aparatur yang berintegritas dan Profesional	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur yang profesional	100	100	100	100	100	100	Meningkatkan kinerja Aparatur melalui pemenuhan sarana dan prasarana kerja aparatur dan peningkatan kapasitas kinerja aparatur	1. Penyediaan sarana dan prasarana kerja yang representatif sesuai dengan kebutuhan 2. peningkatan dan pengembangan kapasitas aparatur sesuai dengan kemampuan / keahliannya	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah 4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
			2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Nilai SKM	80	80	80	80	80	80	Orientasi pelayanan Publik berbasis kepuasan masyarakat	Pencapaian dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan
2.	Meningkatkan Koordinasi Pemerintahan dan penyelenggara Pemerintahan Wilayah Kecamatan Patrang	Prosentase rekomendasi hasil Koordinasi pemerintahan, ketertiban dan Keamanan, pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Koordinasi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan penyelenggara Pemerintahan Wilayah Kecamatan Patrang	Prosentase rekomendasi hasil Koordinasi pemerintahan, ketertiban dan Keamanan, pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	80	80	80	80	80	80	Optimisasi kegiatan bersama penyelenggara Pemerintah dan Masyarakat	Membangun koordinasi antar Penyelenggara Pemerintahan dan Masyarakat	Program koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan

KECAMATAN PATRANG  
JEMBER  
Ir. MCH/ROFIQ SUGIARTO  
PEMBINA  
NIP. 19680413 199303 1 012

**Tabel 5.1.**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN**

NO	Tujuan	NO	Sasaran	NO	Indikator Sasaran	Kode Rekening Program	Program dan Kegiatan	NO	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pd Th. Awal Perencanaan Th.2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi						
											2016		2017		2018		2019		2020		2021				Target	Rupiah				
											Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah			Target	Rupiah				
1	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan Patrang dalam pelayanan publik	1	Menciptakan aparatur yang berintegritas dan profesional	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur yang profesional	4.01.5.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD	98%	100%	217,939,800	100%	1,679,849,000	100%	1,308,679,000	100%	1,439,546,900	100%	1,583,501,590	100%	1,741,851,749	100%	7,971,368,039	Kasubbag umum dan Kepegawaian	Patrang				
							Kegiatan penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik		Persentase tingkat kebutuhan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		100%	1,800,000													100%	1,800,000	Kasubbag umum dan Kepegawaian	Kec. Patrang		
							Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Ada	ada	46,500,000	100%	589,100,000	100%	331,000,000	100%	346,100,000	100%	400,510,000	100%	440,561,000	100%	2,153,771,000			Kasubbag umum dan Kepegawaian	Kec. Patrang		
							Kegiatan penunjang administrasi dan operasional Rutin/kantor/ kedinasan		persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	ada	100%	169,639,800	100%	1,090,749,000	100%	977,679,000	100%	1,075,446,900	100%	1,182,991,590	100%	1,301,290,749	100%	5,797,797,039			Kasubbag umum dan Kepegawaian	Kec. Patrang		
						4.01.5.02	<b>Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur</b>		persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja	99%	67%	118,674,000	100%	163,450,000	100%	164,210,069	100%	190,309,911	100%	205,364,337	100%	227,581,940	100%	1,069,590,257			Kasi PMD & Kasubbag umum dan Kepegawaian	Kec. Patrang		
							Kegiatan Pengadaan meubeler		Persentase Jumlah Pengadaan meubeler	Ada	ada	9,000,000																9,000,000	Kasi Kessos	Kec. Patrang
							Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		persentase tingkat pemeliharaan rumah dinas	Ada	ada					10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000						40,000,000	Kasie Trantib	Kec. Patrang
							Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		persentase tingkat pemeliharaan gedung kantor	ada	ada	3,500,000		80,000,000		86,000,000		86,000,000		86,000,000		86,000,000	ada					427,500,000	Kasie PMD dan Kessos	Kec. Patrang
							Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan		persentase tingkat pemeliharaan mobil jabatan	ada	ada	13,995,000		19,000,000		15,500,000		19,900,000		23,810,000		25,889,000	ada					118,094,000	Kasubbag umum dan Kepegawaian	Kec. Patrang
							Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional		persentase tingkat pemeliharaan Kendaraan Operasional	ada	ada	10,529,000		23,200,000		17,700,000		22,020,000		27,039,337		32,379,200	ada					132,867,537	Kasubbag umum dan Kepegawaian	Kec. Patrang
							Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala alat kantor alat rumah tangga komputer		persentase tingkat pemeliharaan alat kantor alat rumah tangga komputer	ada	ada	3,450,000		29,750,000		27,010,069		39,439,911		39,190,000		44,822,240						183,662,220	Kasie pelayanan Umum	Kec. Patrang
							Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		Jumlah Lokasi gedung Kantor yang direhabilitasi	ada	ada	78,200,000		11,500,000		8,000,000		12,950,000		19,325,000		28,491,450	ada					158,466,450	Kasi PMD dan Kessos	Kec. Patrang
						4.01.5.03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		Persentase tingkat disiplin aparatur	100%	100%	23,562,500																23,562,500	Kasubbag umum dan Kepegawaian	Kec. Patrang
							Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya		Jumlah Pemenuhan pakaian dinas beserta kelengkapannya	ada	ada	5,300,000																5,300,000	Kasubbag umum dan Kepegawaian	Kec. Patrang

NO	Tujuan	NO	Sasaran	NO	Indikator Sasaran	Kode Rekening Program	Program dan Kegiatan	NO	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pd Th. Awal Perencanaan Th.2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
											2016		2017		2018		2019		2020		2021				Target	Rupiah
											Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah				

NO	Tujuan	NO	Sasaran	NO	Indikator Sasaran	Kode Rekening Program	Program dan Kegiatan	NO	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pd Th. Awal Perencanaan Th.2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
											2016		2017		2018		2019		2020		2021				Target	Rupiah
											Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah				
							Kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan pakaian korpri pakaian olahraga pakaian khusus hari-hari tertentu		Jumlah Pemenuhan pakaian olahraga	ada	ada	3,700,000										ada	3,700,000	Kasubbag umum dan Kepegawaian	Kec. Patrang	
							Kegiatan penyelenggaraan peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional		Jumlah pemenuhan Hari-hari besar Nasional yang terlaksana	ada	ada	14,562,500											14,562,500	Kasie Trantib	Kec. Patrang	
						4.01.5.06	<b>Program peningkatan sistim pengembangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		persentase laporan yang tepat	100%	100%	7,900,000	100%	14,112,000	100%	15,750,000	100%	17,325,000	100%	19,057,500	100%	20,963,250	100%	95,107,750	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Kec. Patrang
							Kegiatan penyusunan RKA dan RAPBD SKPD		persentase penyusunan RKA dan RAPBD SKPD	ada	ada	2,900,000	100%	7,600,000	100%	8,018,000	100%	8,819,800	100%	9,701,780	100%	10,671,958	100%	47,711,538	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Kec. Patrang
							Kegiatan penyusunan DPA SKPD		persentase penyusunan DPA SKPD	ada	ada	5,000,000		6,512,000		7,732,000		8,505,200		9,355,720		10,291,292		47,396,212	Kasubbag Perencanaan dan keuangan	Kec. Patrang
						4.01.5.08	<b>Program peningkatan kapasitas kinerja lembaga dan aparatur pemerintahan</b>		persentase Jumlah laporan yang tepat waktu	100%	100%		100%	8,253,000	100%	8,553,000	100%	9,408,300	100%	10,349,130	100%	11,384,043	100%	47,947,473	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Kec. Patrang
							Kegiatan penyusunan Rentra, RKPd dan dokumen perencanaan lainnya		persentase jumlah laporan perencanaan dan keuangan yang disusun	ada	ada		ada	8,253,000	ada	8,553,000	ada	9,408,300	ada	10,349,130	ada	11,384,043	ada	47,947,473	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Kec. Patrang
		2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	1	Nilai SKM	4.01.5.33	<b>Program penataan administrasi kependudukan</b>		persentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai SP dan SOP	100%	100%	46,138,200	100%	47,150,000									93,288,200	Kasie Pelayanan Umum	Kec. Patrang	
							Kegiatan implementasi sistim administrasi kependudukan		persentase Jumlah pelayanan adminduk dan pelayanan umum lainnya	10000	10000	46,138,200	10000	47,150,000									93,288,200	Kasie Pelayanan Umum	Kec. Patrang	
							kegiatan program pelayanan umum kecamatan		persentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai SP dan SOP				100%	107,015,000	100%	117,716,500	100%	129,488,150	100%	142,436,965	100%	142,436,965	100%	496,656,615	Kasie Pelayanan Umum	Kec. Patrang
							Kegiatan Koordinasi Pelayanan Umum		persentase masyarakat tertib administrasi Kependudukan				12000	107,015,000	12000	117,716,500	12000	129,488,150	12000	142,436,965	12000	142,436,965	12000	496,656,615	Kasie Pelayanan Umum	Kec. Patrang

NO	Tujuan	NO	Sasaran	NO	Indikator Sasaran	Kode Rekening Program	Program dan Kegiatan	NO	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pd Th. Awal Perencanaan Th.2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
											2016		2017		2018		2019		2020		2021				Target	Rupiah
											Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah				

NO	Tujuan	NO	Sasaran	NO	Indikator Sasaran	Kode Rekening Program	Program dan Kegiatan	NO	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pd Th. Awal Perencanaan Th.2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
											2016		2017		2018		2019		2020		2021				Target	Rupiah
											Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah				
Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Patrang	1	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Patrang	Presentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan dan ketertiban dan keamanan pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan sosial dalam satu tahun		Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak		Prosentase kegiatan kelembagaan yang terfasilitasi	100%	100%	30,000,000	100%	120,800,000	100%							150,800,000	Kasi PMD dan Kessos	Kec. Patrang				
							kegiatan Penguatan pengarusutamaan gender dan anak	1	1	30,000,000	9	120,800,000	9									150,800,000	Kasi PMD dan Kessos	Kec. Patrang		
							Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban	100%	100%	105,800,000	100%	111,815,000	100%										217,615,000	Kasie Trantib	Kec. Patrang	
							kegiatan pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat	ada	ada	105,800,000	ada	111,815,000	ada										217,615,000	Kasie Trantib	Kec. Patrang	
							Program Perencanaan Pembangunan	90%	90%	3,900,000	90%	42,125,000											46,025,000	Kasie Pemerintahan	Kec. Patrang	
							kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	90%	90%	3,900,000	90%	42,125,000											46,025,000	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Kec. Patrang	
							Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan	99%	99%	300,000,000													300,000,000	Kasi PMD dan Kessos	Kec. Patrang	
							kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jalan	1.621m <sup>2</sup>	1,621	300,000,000													300,000,000	Kasi PMD dan Kessos	Kec. Patrang	
							Program peningkatan pemberdayaan masyarakat pedesaan					1,078,450,000		1,324,800,000		1,457,280,000		1,603,008,000		1,763,308,000		7,226,846,000	Kasi PMD dan Kessos	Kec. Patrang		
							kegiatan rakor lembaga sosial kemasyarakatan RT/RW					1,078,450,000		1,324,800,000		1,457,280,000		1,603,008,000		1,763,308,000		7,226,846,000	Kasi PMD dan Kessos	Kec. Patrang		
Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Patrang	1	Meningkatnya koordinasi bidang pemerintahan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah Kecamatan Patrang	Presentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan dan ketertiban dan keamanan pemberdayaan masyarakat dan Kessos dalam satu tahun	4.01.5.32	Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan Penyelenggaraan		persentase rekomendasi hasil Pemerintahan, Pembangunan	0	0	0	0									Kasie Pemerintahan	Kec. Patrang					
							kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan,				90%	1,487,300,000		1,636,030,000		1,799,633,000		1,979,596,300		6,902,559,300	Kasie Pemerintahan	Kec. Patrang				

NO	Tujuan	NO	Sasaran	NO	Indikator Sasaran	Kode Rekening Program	Program dan Kegiatan	NO	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pd Th. Awal Perencanaan Th.2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
											2016		2017		2018		2019		2020		2021				Target	Rupiah
											Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah				

NO	Tujuan	NO	Sasaran	NO	Indikator Sasaran	Kode Rekening Program	Program dan Kegiatan	NO	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pd Th. Awal Perencanaan Th.2015	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi					
											2016		2017		2018		2019		2020		2021				Target	Rupiah			
											Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah							
							Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Kessos		Jumlah rapat dan Koordinasi pembinaan seksie pemberdayaan masyarakat dan Kesejahteraan Sosial						100%	223,875,000			246,262,500			270,888,750			297,977,625		1,039,003,875	Kasi PMD dan Kessos	Kec. Patrang
							Kegiatan Musrenbang dan Kegiatan lainnya		jumlah dokumen yang diusulkan dan terlaksananya rakor lainnya							88,125,000			96,937,500			106,631,250			117,294,375		408,988,125	Kasi PMD dan Kessos	Kec. Patrang
							Kegiatan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak		jumlah kelembagaan yang terfasilitasi							135,750,000			149,325,000			164,257,500			180,683,250		630,015,750	Kasi PMD dan Kessos	Kec. Patrang
							Koordinasi Penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum		Jumlah rapat dan Koordinasi pembinaan seksie ketertiban dan keamanan umum							214,300,000			235,730,000			259,303,000			285,233,300		994,566,300	Kasie Ketrentaman dan Ketertiban Umum	Kec. Patrang

**TABEL 5.2**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**  
**PROGRAM-PROGRAM RUTIN**

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (OutCome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pd Th. Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi	
			2016		2017		2018		2019		2020		2021		Target Capaian	Rupiah			
			Th.2015	Target Capaian	Rupiah	Target Capaian	Rupiah	Target Capaian	Rupiah	Target Capaian	Rupiah	Target Capaian	Rupiah						
1.20.1.20 13:01:01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Tingkat Kepuasan Aparatur terhdh pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Kebutuhan Listrik yang terpenuhi - Jenis dan Jumlah Peralatan perlengkapan kantor - Jumlah Pemenuhan dsr Operasional Kantor	98%	98%	217,939,800	98%	1,679,849,000	98%	1,308,679,000	98%	1,439,546,900	98%	1,583,501,590	98%	1,741,851,749	7,971,368,039	Sekretariat	Kecamatan Patrang	
1.20.1.20. 13:01:02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> - Pengadaan Meubeler - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Prosentase Sarpras Aparatur dengan kondisi layak fungsi - Jumlah Rumah Dinas yang direhab - Jumlah Gedung Kantor yang direhab - Jumlah mbl Jabatan layak pakai - Jumlah Kendaraan Operasional yang di perbaiki - Jumlah Alat kantor yang layak pakai - Gedung kantor yang layak	99%	67%	118,674,000	98%	163,450,000	98%	164,210,069	98%	190,309,911	98%	205,364,337	98%	227,581,940	1,069,590,257	Sekretariat		
4.01.4.01.6.02 4.01.4.01.6.02.21	- Pengadaan Meubeler - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	- Jumlah Rumah Dinas yang direhab	ada	ada	9,000,000	-	-	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-	10,000,000	-	9,000,000	40,000,000		
4.01.4.01.6.02.22	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Jumlah Gedung Kantor yang direhab	ada	ada	3,500,000	80,000,000	86,000,000	86,000,000	86,000,000	86,000,000	86,000,000	86,000,000	86,000,000	86,000,000	86,000,000	427,500,000			
4.01.4.01.6.02.23	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	- Jumlah mbl Jabatan layak pakai	ada	ada	13,995,000	19,000,000	15,500,000	19,900,000	23,810,000	25,889,000	25,889,000	25,889,000	25,889,000	25,889,000	25,889,000	118,094,000			
4.01.4.01.6.02.24	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan Operasional yang di perbaiki	ada	ada	10,529,000	23,200,000	17,700,000	22,020,000	27,039,337	32,379,200	32,379,200	32,379,200	32,379,200	32,379,200	32,379,200	132,867,537			
4.01.4.01.6.02.30	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	- Jumlah Alat kantor yang layak pakai	ada	ada	3,450,000	29,750,000	27,010,069	39,439,911	39,190,000	44,822,240	44,822,240	44,822,240	44,822,240	44,822,240	44,822,240	183,662,220			
4.01.4.01.6.02.42	- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	- Gedung kantor yang layak	ada	ada	78,200,000	11,500,000	8,000,000	12,950,000	19,325,000	28,491,500	28,491,500	28,491,500	28,491,500	28,491,500	28,491,500	158,466,500			
1.20.1.20. 13:01:03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b> - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pakaian Korpri/ Pakaian Olah Raga/Pakaian Khusus Hari-hari tertentu - Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	Prosentase Tingkat Disiplin Aparatur - Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan - Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan. - Jumlah Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional yang terlaksana	100%	100%	23,562,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,562,500	Sekretariat		
1.20.1.20. 13:01:06	<b>Program Peningkatan Sistem Pengembangan</b> Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD - Penyusunan DPA SKPD	Prosentase Jumlah Laporan yang tepat waktu - Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Keuangan yang disusun - Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Keuangan yang disusun	100%	100%	7,900,000	100%	14,112,000	100%	15,750,000	100%	17,325,000	100%	19,057,500	100%	20,963,250	95,107,750	Sekretariat		
4.01.4.01.6.06.06	- Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD	- Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Keuangan yang disusun	ada	ada	2,900,000	7,600,000	8,018,000	8,819,800	9,701,780	10,671,958	10,671,958	10,671,958	10,671,958	10,671,958	10,671,958	47,711,538			
4.01.4.01.6.08	- Penyusunan DPA SKPD	- Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Keuangan yang disusun	ada	ada	5,000,000	6,512,000	7,732,000	8,505,200	9,355,720	10,291,292	10,291,292	10,291,292	10,291,292	10,291,292	10,291,292	47,396,212			
4.01.4.01.6.08.08	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah</b> - Penyusunan Renstra, RKPD, dan Dokumen Perencanaan Lainnya	Prosentase Jumlah Laporan yang tepat waktu - Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Keuangan yang disusun	100%	100%	-	100%	8,253,000	100%	8,553,000	100%	9,408,300	100%	10,349,130	100%	11,384,043	47,947,473			
4.01.4.01.6.08.06	- Penyusunan Renstra, RKPD, dan Dokumen Perencanaan Lainnya	- Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Keuangan yang disusun	ada	ada	-	8,253,000	8,553,000	9,408,300	10,349,130	11,384,043	11,384,043	11,384,043	11,384,043	11,384,043	11,384,043	47,947,473			

**TABEL RENCANA PROGRAM,KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN,DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2016-2021**  
**( Matriks Rancangan Renstra PD Tahun 2016-2021 )**  
**Perangkat Daerah : KECAMATAN SUMBERSARI**

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (OutCome) dan Kegiatan (OUtput)	Data Capaian pd Th. Awal Perencanaan Th.2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pd akhir proiode (th.2021 )		Bidang
				Target Capaian	Rupiah	Target Capaian	Rupiah	Target Capaian	Rupiah	Target Capaian	Rupiah	Target Capaian	Rupiah	Target Capaian	Rupiah	Target Capaian	Rupiah	
1.20.1.20 13:01:01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Tingkat Kepuasan Aparatur terhdp pelayanan Adminis- trasi Perkantoran	98%	98%	202,744,000	98%	1,237,444,000	98%	1,290,000,000	98%	1,310,000,000	98%	1,335,000,000	98%	1,375,000,000	98%	6,750,188,000	Sekretariat
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Ktr	- Jenis dan Jumlah Peralat- an perlengkapan kantor	ada	ada	73,300,000	ada	570,444,000	ada	600,000,000	ada	610,000,000	ada	625,000,000	ada	650,000,000	ada	3,128,744,000	
	- Penjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	- Jumlah Pemenuhan dsr Operasional Kantor	ada	ada	129,444,000	ada	667,000,000	ada	690,000,000	ada	700,000,000	ada	710,000,000	ada	725,000,000	ada	3,621,444,000	
1.20.1.20. 13:01:02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	Prosentase Sarpras Aparatur dengan kondisi layak fungsi	99%	67%	202,000,000	98%	76,500,000	98%	80,000,000	98%	84,000,000	98%	82,000,000	98%	85,000,000	98%	609,500,000	Sekretariat
	- Pemeliharaan Mobil Jabatan	- Jumlah mbl Jabatan yang layak pakai	ada	ada	9,000,000	ada	15,000,000	ada	17,000,000	ada	19,000,000	ada	20,000,000	ada	21,000,000	ada	101,000,000	
	- Pemeliharaan Kendaa n Operasional Kantor	- Jumlah Kendaraan Opera- sional yang di perbaiki	ada	ada	9,000,000	ada	61,500,000	ada	63,000,000	ada	65,000,000	ada	62,000,000	ada	64,000,000	ada	324,500,000	
	- Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	- Jumlah Gedung Kantor yang direhab	ada	ada	119,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas	- Jumlah Rumah Dinas yang direhab	ada	ada	65,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.20.1.20. 13:01:03	Program Peningkatan di- siplin Aparatur	Prosentase Tingkat Disiplin Aparatur	100%	100%	8,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat
	- Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan /Pakaian Korpri/pakaian Olah Raga/Pakaian khusus hari-hari tertentu.	- Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang di- adakan.	ada	ada	8,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.20.1.20. 13:01:06	Program Peningkatan Sistem Pengembangan Pelaporan Capaian Kiner- ja dan Keuangan	Prosentase Jumlah Laporan yang tepat waktu	100%	100%	2,900,000	100%	7,600,000	100%	8,000,000	100%	8,200,000	100%	8,500,000	100%	9,000,000	100%	44,200,000	Sekretariat
	- Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD	- Jumlah Dokumen Laporan Perencanaan dan Keuangan yang disusun	ada	ada	2,900,000	ada	7,600,000	ada	8,000,000	ada	8,200,000	ada	8,500,000	ada	9,000,000	ada	44,200,000	
1.03.1.20. 13:01:15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Prosentase Jalan yang dibangun	99%	99%	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99%	300,000,000	Kasi PMD
	- Pembangunan Jalan	- Panjang jalan yang direhabi- litasi.	600m2	600m2	300,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600m2	300,000,000	
	Program Penyelenggara- an Pelayanan Umum	Prosentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP	100%	100%	16,710,000	100%	265,700,000	100%	270,000,000	100%	275,000,000	100%	277,000,000	100%	280,000,000	100%	1,384,410,000	Kasi Pelum
	- Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan umum	- Jumlah pelayanan adminis- trasi kependudukan dan Pelayanan Umum yang di proses.	10000	10000	16,710,000	10000	265,700,000	10000	265,700,000	10000	275,000,000	10000	277,000,000	10000	280,000,000	50,000	1,384,410,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	15	16	18	19	20
	Program Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial, ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi dan penyelenggaraan di bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial dan ketentraman dan ketertiban umum.																
	1 Koordinasi penyelenggaraan seksi pemerintahan - Rapat-rapat koordinasi Lembaga Sosial Masyarakatan/RT-RW	Jumlah RT/RW yang terfasilitasi	100%	100%	445,820,000	100%	1,332,180,000	100%	1,332,180,000	100%	1,332,180,000	100%	1,332,180,000	100%	1,332,180,000	100%	7,106,720,000	Kasi Pemerintahan
	2. Koordinasi Penyelenggaraan seksi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial . - Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	- Jumlah Jenis Kegiatan kelembagaan yang terfasilitasi	8	8	30,000,000	9	114,000,000	9	114,000,000	10	116,000,000	10	116,000,000	11	118,000,000	57	608,000,000	Kasi PM dan Kesos
	- Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan publik	- Jumlah dokumen perencanaan yang diusulkan.	75%	75%	6,250,000	79%	31,000,000	0%	31,000,000	0%	33,000,000	0%	33,000,000	0%	35,000,000	100%	169,250,000	Kasi PM dan Kesos
	3. Koordinasi penyelenggaraan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan keamanan - Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	- Jumlah Satuan Keamanan yang ada di Lingkungan masyarakat.	ada	ada	115,600,000	ada	117,480,000	ada	117,480,000	ada	119,000,000	ada	120,000,000	ada	120,000,000	ada	-	-

Jember, 16 Januari 2016


  
 PATRANG  
 KECAMATAN  
 PATRANG  
 JEMBER  
 Ir. MCH. ROFIQ SUGIARTO  
 PEMBINA  
 NIP. 19680413 199303 1 012

**TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2016 - 2021**  
**(Matrik Rancangan Renstra PD Tahun 2016-2021)**  
**KECAMATAN PATRANG**

Kode rekening Program	Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan Tahun 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (tahun 2021)		Bidang
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		target capaian	Rupiah	
				target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.01.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	100%	100%	217,939,800	100%	1,670,621,000	100%	1,837,683,100	0%	2,021,451,410	100%	2,223,596,551	100%	2,445,956,206	100%	10,417,248,067	Kasubbag Umum dan Kepegawain
4.01.06.01.	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan Kebutuhan tenaga Listrik Kantor	100%	100%	1,800,000	100%	-	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	1,800,000	Kasubbag Umum dan Kepegawain
4.01.06.01.13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	46,500,000	100%	524,000,000	100%	576,400,000	100%	634,040,000	0%	697,444,000	0%	767,188,400	100%	1,146,900,000	Kasubbag Umum dan Kepegawain
4.01.06.01.27	Kegiatan Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD	90%	100%	169,639,800	100%	1,146,621,000	100%	1,261,283,100	100%	1,387,411,410	100%	1,526,152,551	100%	1,678,767,806	100%	7,169,875,667	Kasubbag Umum dan Kepegawain
4.01.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja sesuai standar daerah	100%	100%	118,674,000	100%	152,450,000	0%	167,695,000	0%	184,464,500	0%	202,910,950	0%	223,202,045	100%	1,164,724,320	Kasubbag Umum dan Kepegawain
4.01.06.02.	Kegiatan Pengadaan Mebeleur	Persentase kebutuhan perlengkapan kantor	100%	100%	9,000,000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%	9,000,000	Kasi PMD
4.01.06.02.22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase tingkat pemeliharaan gedung kantor	100%	100%	3,500,000	100%	80,000,000	100%	88,000,000	100%	96,800,000	100%	106,480,000	100%	117,128,000	100%	491,908,000	Kasubbag Umum dan Kepegawain
4.01.06.02.23	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Persentase tingkat pemeliharaan mobil jabatan	95%	100%	13,995,000	100%	14,000,000	100%	15,400,000	100%	16,940,000	100%	18,634,000	100%	20,497,400	100%	99,466,400	Kasubbag Umum dan Kepegawain

Kode rekening Program	Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan Tahun 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Bidang
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		target capaian	Rupiah	
				target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah			
4.01.06.02.24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase tingkat pemeliharaan kendaraan dinas	95%	100%	10,529,000	100%	20,200,000	100%	22,220,000	100%	24,442,000	100%	26,886,200	100%	29,574,820	100%	133,852,020	Kasubbag Umum dan Kepegawain
4.01.06.02.30	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	Persentase tingkat Pemeliharaan peralatan kantor	100%	100%	3,450,000	100%	26,750,000	100%	29,425,000	100%	32,367,500	100%	35,604,250	100%	39,164,675	100%	166,761,425	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
4.01.06.02.42	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah lokasi gedung kantor yang direhabilitasi	100%	100%	78,200,000	100%	11,500,000	100%	12,650,000	100%	13,915,000	100%	15,306,500	100%	16,837,150	100%	102,350,000	Kasi PMD
<b>4.01.06.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase tingkat disiplin aparatur</b>	<b>100%</b>		<b>23,562,500</b>	<b>100%</b>	<b>24,250,000</b>	<b>100%</b>	<b>26,675,000</b>	<b>100%</b>	<b>29,342,500</b>	<b>100%</b>	<b>32,276,750</b>	<b>100%</b>	<b>35,504,425</b>	<b>100%</b>	<b>249,023,843</b>	<b>Kasubbag Umum dan Kepegawain</b>
4.01.06.03.	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian Beserta Kelengkapannya	Persentase tingkat disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100%	100%	5,300,000	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	5,300,000	Kasubbag Umum dan Kepegawain
4.01.06.03.	Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pakaian Korpri/Pakaian Olah Raga/Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Persentase tingkat disiplin aparatur dalam berseragam	90%	100%	3,700,000	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	3,700,000	Kasubbag Umum dan Kepegawain
4.01.06.03.05	Kegiatan Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional	Persentase tingkat pelaksanaan kegiatan	90%	100%	14,562,500	100%	24,250,000	100%	26,675,000	100%	29,342,500	100%	32,276,750	100%	35,504,425	100%	162,611,175	Kasubbag Umum dan Kepegawain
<b>4.01.06.06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Laporan yang tepat</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>10,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>21,756,000</b>	<b>100%</b>	<b>23,931,600</b>	<b>100%</b>	<b>26,324,760</b>	<b>100%</b>	<b>28,957,236</b>	<b>100%</b>	<b>31,852,960</b>	<b>100%</b>	<b>142,822,556</b>	<b>Kasubbag Perencanaan dan Keuangan</b>
4.01.06.06.05	Kegiatan Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD	Persentase tertib laporan perencanaan keuangan	90%	90%	5,000,000	100%	10,878,000	100%	11,965,800	100%	13,162,380	100%	14,478,618	100%	15,926,480	100%	71,411,278	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
4.01.06.06.06	Kegiatan Penyusunan DPA SKPD	Persentase tertib laporan perencanaan	100%	100%	5,000,000	100%	10,878,000	100%	11,965,800	100%	13,162,380	100%	14,478,618	100%	15,926,480	100%	71,411,278	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Kode rekening Program	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan Tahun 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (tahun 2021)		Bidang
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		target capaian	Rupiah	
				target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.01.06.08	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah	Persentase tingkat pencapaian pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan	0%	0%	0	100%	15,499,000	100%	17,048,900	100%	18,753,790	100%	20,629,169	100%	22,692,086	100%	94,622,945	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
4.01.06.08.06	Kegiatan Penyusunan Renstra RKPd dan Dukumen Perencanaan Lainnya	Persentase tertib laporan perencanaan program dan kegiatan	0%	0%	0	100%	15,499,000	100%	17,048,900	100%	18,753,790	100%	20,629,169	100%	22,692,086	100%	94,622,945	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
4.01.06.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan		0%	100%	46,138,200	100%	46,150,000	100%	50,765,000	100%	55,841,500	100%	61,425,650	100%	67,568,215	100%	327,888,565	Kasi Pelayanan umum
4.01.06.15.03	Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)	Persentase masyarakat tertib administrasi kependudukan	90%	100%	46,138,200	100%	46,150,000	100%	50,765,000	100%	55,841,500	100%	61,425,650	100%	67,568,215	100%	327,888,565	Kasi Pelum
4.01.06.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase tingkat pelaksanaan kegiatan Pembinaan Wilayah Terpadu antar Desa	100%	100%	14,601,500	100%	995,800,000	100%	1,324,800,000	100%	1,324,800,000	100%	1,324,800,000	100%	1,324,800,000	100%	6,309,601,500	Kasi Pemerintahan
4.01.06.15.07	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Lembaga Sosial Kemasyarakatan/ RT/RW	Persentase tingkat pelaksanaan kegiatan Pembinaan RT/RW	100%	100%	14,601,500	100%	995,800,000	100%	1,324,800,000	100%	1,324,800,000	100%	1,324,800,000	100%	1,324,800,000	100%	6,309,601,500	Kasi Pemerintahan
4.01.06.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		100%	100%	30,000,000	12	126,000,000	12	138,600,000	100%	152,460,000	100%	167,706,000	100%	184,476,600	12	799,242,600	Kasi PMD
4.01.06.16.05	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah pembinaan, pelatihan dan lomba	100%	100%	30,000,000	100%	126,000,000	100%	138,600,000	100%	152,460,000	100%	167,706,000	100%	184,476,600	100%	799,242,600	Kasi PMD

Kode rekening Program	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun awal Perencanaan Tahun 2015	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra (tahun 2021)		Bidang
				2016		2017		2018		2019		2020		2021		target capaian	Rupiah	
				target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah	target capaian	Rupiah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.01.06.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase tingkat pelaksanaan kegiatan Pembinaan Wilayah Terpadu antar Desa	100%	100%	14,601,500	100%	23,300,000	100%	25,630,000	100%	28,193,000	100%	31,012,300	100%	34,113,530	100%	156,850,330	Kasi Pemerintahan
4.01.06.17.08	Kegiatan Pembinaan Wilayah Terpadu antar Desa	Persentase tingkat pelaksanaan kegiatan Pembinaan Wilayah Terpadu antar Desa	100%	100%	14,601,500	100%	23,300,000	100%	25,630,000	100%	28,193,000	100%	31,012,300	100%	34,113,530	100%	156,850,330	Kasi Pemerintahan
4.01.06.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jumlah lokasi	100%	100%	300,000,000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	4	300,000,000	Kasi PMD
4.01.06.	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Jumlah lokasi	100%	100%	300,000,000	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	4	300,000,000	Kasi PMD
4.01.06.19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase keamanan lingkungan	90%	100%	105,800,000	100%	111,865,000	100%	123,051,500	100%	135,356,650	100%	148,892,315	100%	163,781,547	100%	788,747,012	Kasi Trantib
4.01.06.19.01	Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Persentase keamanan lingkungan	90%	100%	105,800,000	100%	111,865,000	100%	123,051,500	100%	135,356,650	100%	148,892,315	100%	163,781,547	100%	105,800,000	Kasi Trantib
4.01.06.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Tingkat Peningkatan Partisipasi Masyarakat	90%	100%	3,900,000	100%	42,125,000	100%	46,337,500	100%	50,971,250	100%	56,068,375	100%	61,675,213	100%	261,077,338	Kasi PMD
4.01.06.21.01	Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	Persentase partisipasi masyarakat	90%	100%	3,900,000	100%	42,125,000	100%	46,337,500	100%	50,971,250	100%	56,068,375	100%	61,675,213	100%	261,077,338	Kasi PMD